

KINERJA KOPERASI DI INDONESIA

Abi Pratiwa Siregar

Fakultas Pertanian, Universitas Gadjah Mada
email: abipratiwasiregar@ugm.ac.id

Abstract

This research aims to determine the performance of co-operatives in Indonesia in terms of financial and non-financial aspects. The basic method of this research is analytical descriptive using secondary data from publications of the Ministry of Co-operatives and SMEs. Initially, data from 2000 to 2019 will be used, but from 2016 to 2019, the data is temporary so it cannot be compared with previous years which are fixed data. Financial performance is measured using DER, NPM, and ROE. Meanwhile, financial performance is known by various parameters, namely the number of active co-operatives, the number of inactive co-operatives, the proportion of inactive co-operatives to the number of co-operatives, the development of the number of members, the proportion of co-operatives conducting annual member meetings (RATs) to the number of active co-operatives, and the development of the number of managers (managers and employees). The results showed that the financial performance of co-operatives in Indonesia showed positive developments or getting better. However, the capital structure of co-operatives over time is increasingly dominated by external capital which is generally in the form of debt. In the non-financial aspect, co-operatives in Indonesia show a declining development: The number of inactive co-operatives is increasing as the number of co-operatives increases, active co-operatives but not implementing RATs show an increasing tendency, the number of members decreases and labor absorption has not been able to be maximized due to limitations co-operatives both financially and organization readiness.

Keywords: Annual Member Meetings, Co-operative, Financial Performance, Number of members

1. PENDAHULUAN

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-perorangan atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan (UU No. 25/1992). Di Indonesia, koperasi yang pertama kali berdiri bergerak di bidang perkreditan, karena menyesuaikan dengan kondisi masyarakat yang terjerat oleh lintah darat (Siregar, 2019). Namun demikian, seiring berjalannya waktu, dengan permasalahan masyarakat yang beragam, maka koperasi juga memiliki jenis usaha lain.

Siregar & Jamhari (2013) mengemukakan bahwa sedikitnya terdapat 25 bentuk koperasi, yaitu : kerajinan industri, wisata, simpan pinjam, pasar, serba usaha, karyawan, jasa, wanita, perikanan, ternak, pertanian, angkutan, pondok pesantren, KUD, KOPTI, KPRI, ABRI, BMT, pensiun, mahasiswa, pemuda, PKL, dan nelayan. Dari 25 bentuk tersebut, dapat dikelompokkan menjadi empat jenis, yaitu koperasi konsumsi, koperasi produksi, koperasi simpan pinjam, dan koperasi serba usaha (Susanti, 2015). Koperasi konsumsi didirikan sebagai penyedia kebutuhan sehari-hari anggota dan masyarakat. Pada umumnya, ketika belanja, anggota akan mendapatkan insentif yang tidak diperoleh non-anggota. Koperasi produksi berfungsi

untuk membantu kegiatan proses produksi yang dilakukan oleh para anggota. Sementara itu, koperasi simpan pinjam merupakan penyedia pinjaman sekaligus institusi tempat menyimpan uang. Di sisi lain, koperasi serba usaha menjalankan lebih dari satu usaha, misalnya produksi dan konsumsi atau simpan pinjam dan konsumsi.

Menurut Zulhartati (2010), selain menyediakan suatu usaha untuk pemenuhan konsumsi, memfasilitasi kegiatan produksi, penyediaan sarana menabung dan meminjam, masyarakat juga membutuhkan suatu lembaga yang membantu produsen dalam memasarkan produknya kepada konsumen. Atas dasar hal tersebut, kemudian didirikan koperasi pemasaran. Koperasi ini bertujuan agar produk yang dihasilkan anggota dapat menjangkau pasar yang lebih luas apabila dibandingkan dengan anggota itu memasarkan sendiri.

Sejak pertama kali diinisiasi pada tahun 1895, koperasi di Indonesia telah melalui berbagai tantangan dan mencatatkan prestasi. Tantangan tersebut antara lain dinamika perkembangan perekonomian, transisi orde pemerintahan, peraturan perundang-undangan, dan persaingan usaha. Sedangkan prestasi yang berhasil diraih salah satunya adalah ikut berkontribusi dalam swasembada beras.

Sartono (2010) mengungkapkan bahwa cita-cita koperasi adalah menentang individualisme dan

kapitalisme secara fundamental. Paham koperasi di Indonesia ingin menciptakan masyarakat yang kolektif dan berakar pada adat-istiadat. Namun demikian, koperasi telah kehilangan konsep pengembangan strategi dalam merespon persaingan dan pasar yang berkembang dengan cepat. Koperasi disebut telah mati suri (terpendam), dan oleh karena itu harus diberdayakan melalui usaha nyata dari masyarakat perkoperasian dan penyelenggara negara.

Kementerian Koperasi dan UMKM menyatakan bahwa tidak sedikit koperasi yang mati suri. Menurut Widayani (2015), meningkatnya jumlah koperasi yang mati suri disebabkan permodalan dan kurangnya sumber daya manusia yang handal dan cakap. Sementara itu, Faedlulloh (2015), memaknai tidak aktifnya koperasi sebagai koperasi disfungsi. Penyebab koperasi disfungsi antara lain ketidasesuaian tujuan, fungsi, dan peran kooperasi dengan dinamika dan perkembangan koperasi di Indonesia. Koperasi sebagai entitas ekonomi, sosial, dan budaya terus dipolitisasi dan diintervensi sehingga tidak membuat koperasi tersebut berkembang. Oleh karena itu, saat ini koperasi seperti lupa dengan jati dirinya dan tidak menjalankan prinsip-prinsip koperasi secara benar.

Prinsip koperasi pertama kali diperkenalkan di Rochdale, Inggris pada tahun 1944. Prinsip ini disusun sebagai panduan bagi Rochdale pada masa itu untuk menjadi panduan dalam meraih tujuannya. Namun demikian, setiap negara perlu menyesuaikan dengan kondisi dan keadaan koperasi. Di Indonesia, prinsip koperasi terdiri dari: keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, pengelolaan dilakukan secara demokratis, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, dan kemandirian. Lebih lanjut, agar dapat berkembang maka koperasi juga perlu melaksanakan pendidikan perkoperasian dan kerjasama antar koperasi. Pada koperasi yang melanggar prinsip-prinsip tersebut, Kemenkop dan UMKM memberikan julukan sebagai koperasi nakal. Koperasi nakal pada umumnya, hanya berkegiatan untuk pencucian uang, investasi ilegal dan rentenir berkedok koperasi (Mahardhika, 2020)

Agar dapat memperbaiki apa yang telah terjadi atau sedang berlangsung, maka diperlukan suatu evaluasi terhadap kinerja koperasi di Indonesia. Kinerja diartikan sebagai suatu ketercapaian terhadap pencapaian terhadap tujuan yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pengukuran kinerja merupakan suatu upaya yang diambil para pemangku kepentingan untuk menentukan/menilai pencapaian suatu strategi atau pencapaian terhadap target.

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui kinerja koperasi di Indonesia ditinjau dari aspek keuangan dan non keuangan.

Ikhsan (2013) mengukur kinerja koperasi di Kota Banda Aceh dengan cara membandingkan sisa hasil usaha yang diperoleh pada tahun 2009 dengan sisa hasil usaha tahun 2008, jumlah anggota, sumber daya manusia, rentabilitas, profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, aktivitas. Kesimpulan yang diperoleh adalah dari sudut pandang jumlah anggota dan likuiditas, kinerja koperasi dinyatakan semakin baik karena adanya tambahan modal. Akan tetapi, rentabilitas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas koperasi mengalami penurunan.

Tolong et al., (2020) menggunakan rasio likuiditas, solvabilitas dan rasio rentabilitas dalam mengukur kinerja koperasi berdasarkan perspektif keuangan. Hasil penelitiannya adalah koperasi sudah memenuhi kriteria yang sangat bagus. Sementara itu, binarsih membandingkan kinerja di antara koperasi wanita dengan koperasi “pria wanita di beberapa kota di Jawa Tengah. Keberhasilan koperasi di ukur dengan efisiensi operasional atau efisiensi usaha. Efisiensi menjadi salah satu indikator karena merupakan prasyarat dalam mewujudkan tingkat pelayanan bagi para anggotanya. Adapun variabel yang diukur adalah rentabilitas proporsi volume usaha dengan jumlah anggota, likuiditas dan solvabilitas. Hasil penelitian ini menyimpulkan tidak ada perbedaan kinerja secara signifikan.

Astawa et al., (2020) berpendapat bahwa pengukuran kinerja yang selama ini banyak digunakan adalah pengukuran tradisional yang hanya menekankan pada aspek finansial saja sehingga tidak mencerminkan organisasi yang sesungguhnya. Oleh karena itu, studinya menggunakan *Balanced Scorecard* dalam mengukur kinerja KUD Penebel Tabanan. *Balanced Scorecard* dianggap mampu menerjemahkan visi, misi, dan strategi suatu organisasi ke dalam tujuan operasional dan ukuran kinerja baik finansial maupun non finansial. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa kinerja KUD Penebel Tabanan selama periode 2015 hingga 2018 memiliki kinerja baik. Dilihat dari perspektif keuangan, rasio lancar mengalami peningkatan. Nilai *Return On Asset* (ROA) dan *Return On Equity* (ROE) secara rata-rata mencapai target. Pada perspektif anggota, koperasi mampu mempertahankan anggota lama dan meningkatkan jumlah anggota baru. Selain itu, proses inovasi, operasi, layanan, proses pembelajaran dan pertumbuhan mengalami peningkatan.

2. METODE PENELITIAN

Metode dasar penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu suatu metode yang memberikan gambaran keadaan yang sebenarnya dari obyek yang diteliti berdasarkan fakta-fakta yang ada dengan cara mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis berbagai macam data sehingga dapat ditaklukkan suatu kesimpulan (Rori, 2013). Obyek penelitian ini adalah koperasi di Indonesia, tanpa memperhatikan jenis atau tingkatan koperasinya. Hal ini mengacu pada data yang dipublikasikan oleh Kementerian Koperasi dan UKM. Oleh karena itu, data dalam penelitian ini terbatas pada data sekunder. Data berasal dari publikasi Kementerian Koperasi dan UKM mengenai koperasi dari tahun 2000 hingga tahun 2019. Namun demikian, setelah ditelusuri lebih detail, data koperasi sejak tahun 2016 hingga 2019 tidak bisa digunakan karena bersifat sangat sementara, berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya yang berstatus lengkap atau *fixed*.

Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan menggambarkan bagaimana koperasi memanfaatkan sumber daya yang ada untuk meraih tujuan yang ditinjau melalui aspek keuangan. Dalam penelitian ini, aspek keuangan terdiri dari *Debt to Equity Ratio* (DER), *Net Profit Margin* (NPM), dan ROE. Adapun rumus matematis dari ketiga parameter tersebut adalah sebagai berikut:

$$\text{DER} = \frac{\text{Total Modal Luar}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \quad (1)$$

$$\text{NPM} = \frac{\text{SHU}}{\text{Volume usaha}} \times 100 \quad (2)$$

$$\text{ROE} = \frac{\text{SHU}}{\text{Modal Sendiri}} \times 100 \quad (3)$$

Kinerja Non Keuangan

Kinerja non keuangan menggambarkan bagaimana perkembangan koperasi dari waktu ke waktu yang ditinjau berdasarkan jumlah koperasi aktif, jumlah koperasi tidak aktif, proporsi koperasi tidak aktif terhadap jumlah koperasi, perkembangan jumlah anggota, proporsi koperasi melaksanakan rapat anggota tahunan (RAT) terhadap jumlah koperasi aktif, serta perkembangan jumlah pengelola (manajer dan karyawan). Untuk menjawab beberapa parameter tersebut, ada yang diuraikan secara deskriptif tanpa perlu melakukan perhitungan matematis karena data telah tersedia sebelumnya (data sekunder). Namun demikian, untuk data yang belum tersedia, masih tetap perlu dilakukan perhitungan, antara lain:

$$\text{Koperasi tidak aktif terhadap jumlah koperasi} = \frac{\sum \text{koperasi tidak aktif}}{\sum \text{koperasi}} \times 100 \quad (4)$$

$$\text{Perkembangan jumlah anggota} = \frac{\sum \text{anggota}(t) - \sum \text{anggota}(t-1)}{\sum \text{anggota}(t-1)} \times 100 \quad (5)$$

Koperasi yang melaksanakan RAT terhadap jumlah koperasi aktif =

$$\frac{\sum \text{koperasi yang melaksanakan RAT}}{\sum \text{koperasi aktif}} \times 100 \quad (6)$$

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

waktu panen tanaman menentukan hasil), tinggi tanaman merupakan hasil dari pembelahan sel dan perpanjangan sel, sehingga tanaman yang di panen lebih tua akan menghasilkan tinggi

A. Kinerja Koperasi di Indonesia

a. Kinerja Keuangan

• DER

DER menunjukkan perbandingan di antara total hutang yang dijamin oleh modal sendiri. Pada penelitian ini, total hutang diasumsikan sama dengan modal luar. Dalam kurun waktu 15 tahun, kinerja keuangan koperasi semakin menurun ditinjau dari struktur permodalan dalam pembiayaan aktivitas. Koperasi semakin tidak mandiri dalam mendanai kegiatan operasionalnya. Pada tahun 2000, nilai DER adalah 183 persen. Artinya, setiap Rp. 100 modal luar dijamin oleh Rp. 180 modal sendiri. Sementara pada tahun 2015, nilai DER adalah 70%. Hal ini menandakan pada tahun tersebut, setiap Rp. 100 modal luar dijamin oleh Rp. 70 modal sendiri.

Tabel 1. DER Koperasi di Indonesia, 2000 - 2015

Tahun	DER (%)
2000	183
2001	140
2002	172
2003	159
2004	141
2005	123
2006	131
2007	115
2008	121
2009	111
2010	115
2011	111

Tahun	DER (%)
2012	100
2013	90
2014	90
2015	70

Sumber: Kemenkop UKM (diolah)

• NPM

NPM menggambarkan kepada para pemangku kepentingan koperasi sejauh mana SHU dapat dihasilkan pada setiap Rp. 100 penjualan. Dalam penelitian ini, yang dimaksud penjualan adalah volume usaha sebagaimana data tersedia oleh Kemenkop UKM.

Sejak tahun 2000 hingga tahun 2015, setiap tahunnya nilai NPM tumbuh sekitar 0,23 persen. Hal ini menunjukkan volume usaha koperasi senantiasa bertumbuh dan diikuti dengan pengelolaan biaya yang terkendali, sehingga setiap Rp. 100 penjualan mampu menghasilkan SHU lebih besar setiap tahunnya.

Tabel 2. NPM Koperasi di Indonesia, 2000 - 2015

Tahun	NPM (%)
2000	3.00
2001	8.09
2002	3.48
2003	5.91
2004	5.75
2005	5.38
2006	5.13
2007	5.50
2008	5,79
2009	6.46
2010	7.32
2011	6.67
2012	5.59
2013	6.46
2014	7.85
2015	6.51

Sumber: Kemenkop UKM (diolah)

• ROE

Anggota perlu mendapatkan informasi sejauh mana koperasi mampu menghasilkan SHU dari pemanfaatan modal sendiri. Dengan demikian, anggota akan semakin memahami bahwa partisipasi anggota

merupakan hal strategis dalam pengembangan koperasi, dan di saat yang bersamaan anggota bisa mengevaluasi pengelolaan koperasi oleh pengurus.

Nilai ROE berfluktuasi setiap tahun namun kecenderungannya positif. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2015, setiap tahunnya nilai ROE naik 0,13 persen. Hal ini terlihat positif namun apabila dilihat lebih detail, koperasi di Indonesia pada umumnya hanya mampu mempertahankan pertumbuhan ROE positif dalam jangka waktu satu tahun. Pada tahun berikutnya nilai ROE drop. Pola ini bisa terlihat dari tahun 2005 ke 2006, ROE naik 0,4 persen namun tahun berikutnya turun dan dua tahun berikutnya naik.

Nilai pertumbuhan ROE ditopang terutama sekali oleh kenaikan dari tahun 2000 ke 2001 yaitu sebesar 16,60 persen. Pada tahun-tahun berikutnya, pertumbuhan tidak pernah mendekati angka tersebut.

Apabila dibandingkan pertumbuhan yang terjadi di antara modal sendiri dan modal luar, maka diketahui sebagian besar SHU berasal dari penggunaan modal luar. Sejak tahun 2000 hingga 2015, modal sendiri naik 25 persen per tahun, sedangkan SHU tumbuh 42 persen per tahun. Namun demikian, rata-rata pertumbuhan ROE hanya 0,13 persen.

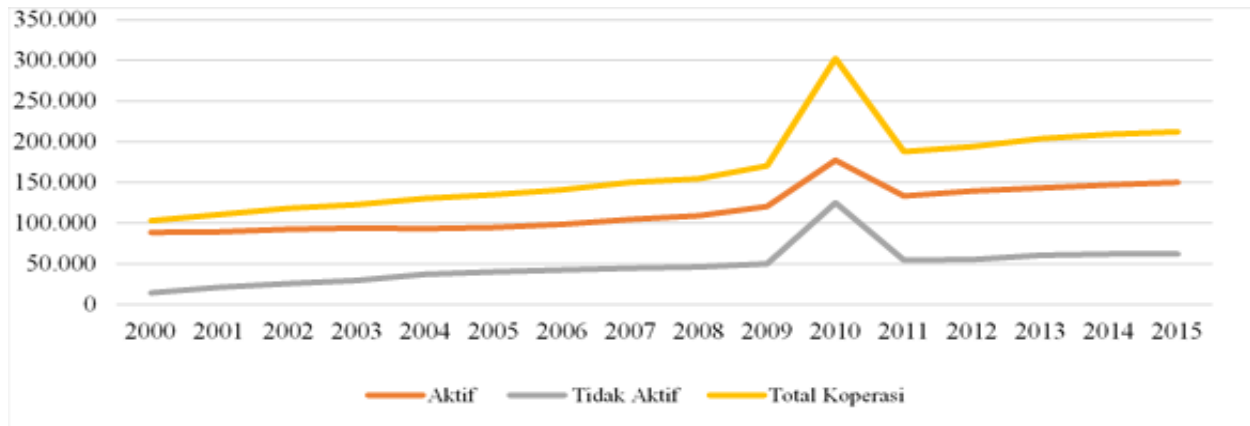
Tabel 3. ROE Koperasi di Indonesia, 2000 - 2015

Tahun	ROE (%)
2000	10
2001	27
2002	12
2003	20
2004	18
2005	15
2006	19
2007	17
2008	18
2009	19
2010	19
2011	18
2012	13
2013	9
2014	14
2015	12

Sumber: Kemenkop UKM (diolah)

b. Kinerja Non Keuangan

• Jumlah koperasi aktif dan koperasi tidak aktif



Gambar 1. Jumlah koperasi aktif, koperasi tidak aktif, dan total koperasi di Indonesia, 2000 - 2015

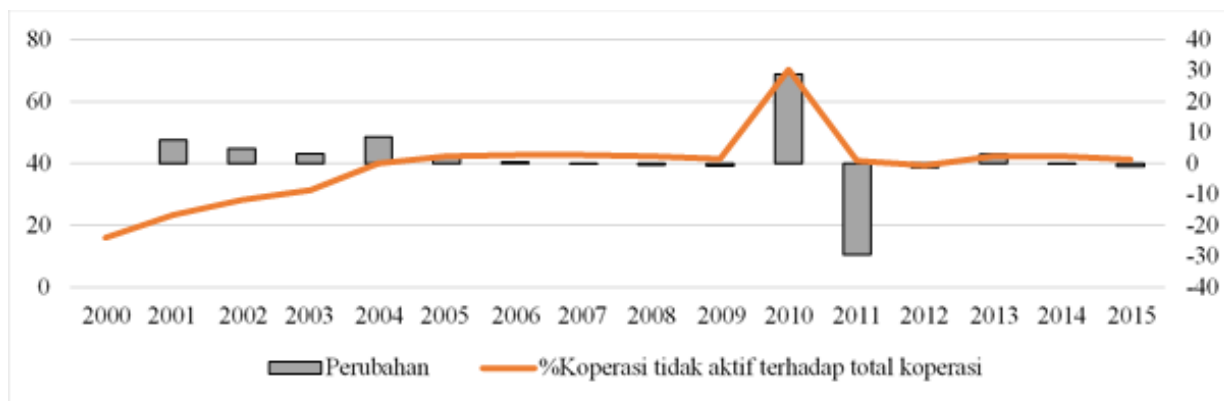
Pada tahun 2000, jumlah koperasi di Indonesia tercatat sebanyak 103.077 unit, dimana 88.930 aktif, dan 14.147 tidak aktif. Lima belas tahun kemudian, jumlah koperasi telah bertambah lebih dari 100 persen dan mencapai 212.135 unit, yang terdiri dari 150.223 koperasi aktif dan sisanya 61.912 koperasi tidak aktif.

Informasi mengenai perkembangan koperasi aktif, tidak aktif, dan total koperasi disajikan pada Gambar 1. Berdasarkan Gambar 1 tersebut, diketahui bahwa pola yang umum terjadi, kenaikan jumlah koperasi diikuti dengan kenaikan koperasi tidak aktif.

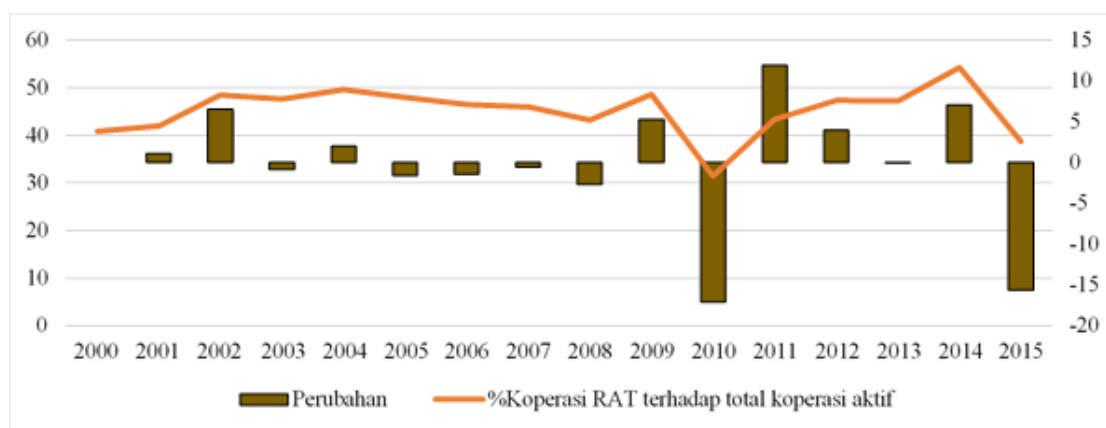
• Proporsi koperasi tidak aktif terhadap jumlah koperasi

Secara kuantitas, pertumbuhan ini menunjukkan kualitas yang rendah karena jumlah koperasi tidak aktif di tahun 2015 lebih banyak yaitu 29 persen, jika dibandingkan dengan tahun 2000 yang hanya 14 persen.

Keberadaan koperasi tidak bisa dipungkiri bukan hanya untuk mengakomodir perekonomian kerakyatan dengan gerakan dari untuk dan oleh rakyat. Melainkan pada beberapa kesempatan juga dimanfaatkan sebagai wadah penyalur program pemerintah. Dampaknya, meskipun koperasi punya visi misi, namun pada tahapan pelaksanaan, hanya bertindak sebagai fasilitator program kerja pemerintah kepada masyarakat.



Gambar 2. % koperasi tidak aktif terhadap total koperasi



Gambar 3. % koperasi RAT terhadap total koperasi aktif

Gambar 2 menyajikan informasi dinamika banyaknya jumlah koperasi tidak aktif terhadap total koperasi di Indonesia. Apabila di rata-rata, dalam kurun waktu 15 tahun sejak tahun 2000 hingga tahun 2015, persentase koperasi tidak aktif mencapai 39 persen.

• Proporsi koperasi melaksanakan RAT terhadap jumlah koperasi aktif

Pemerintah perlu memberikan klasifikasi terhadap koperasi aktif dan tidak aktif dengan lebih rinci dan sesuai kondisi di lapangan. Pada praktiknya, ada koperasi yang sudah lama tutup dan bahkan ditinggal pengurus, namun masih terdaftar. Pada kasus lain, terdapat koperasi yang masih aktif menjalankan kegiatan namun tidak melaksanakan RAT.

Pemerintah melalui Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 19 tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi telah mengatur sedemikian rupa pelaksanaan RAT. Pada Pasal 20 ayat (3d) dijelaskan bahwa bagi koperasi yang tidak melaksanakan RAT minimal 2 (dua) kali atau lebih secara berturut-turut diberi surat peringatan tertulis dan surat rencana pembubaran oleh pejabat yang berwenang.

Koperasi aktif namun tidak menjalankan RAT dapat dikatakan relatif banyak. Sejak tahun 2000 hingga tahun 2015, rata-rata mencapai 45 persen. Hal ini dapat menjadi fokus pemerintah dalam hal pengawasan perkembangan koperasi. RAT merupakan sarana bagi para pemangku kepentingan untuk menilai bagaimana kinerja pengurus dalam satu tahun dan mempersiapkan rencana kerja pada tahun berikutnya.

Fakta yang terjadi dilapangan, alasan yang umumnya muncul adalah biaya operasional pelaksanaan RAT yang relatif besar dibandingkan

dengan ketersediaan dana yang ada di koperasi atau dokumen administrasi yang belum selesai. Untuk alasan yang paling akhir, hal ini umum ditemukan di koperasi dimana para pengurusnya berada pada usia lanjut. Sehingga kecepatan dalam menyelesaikan dokumen administrasi relatif lebih rendah dibandingkan koperasi yang diisi oleh kaum muda.

Untuk itu, pemerintah melalui perangkat daerah bisa membentuk tim untuk mendampingi secara langsung koperasi yang mengalami kesulitan administrasi. Dengan demikian, koperasi sehat akan semakin banyak dan menjadi tolak ukur bagi koperasi lain yang belum bisa RAT. Koperasi sehat merupakan predikat yang diberikan kepada koperasi yang berhasil RAT tepat waktu secara terus menerus.

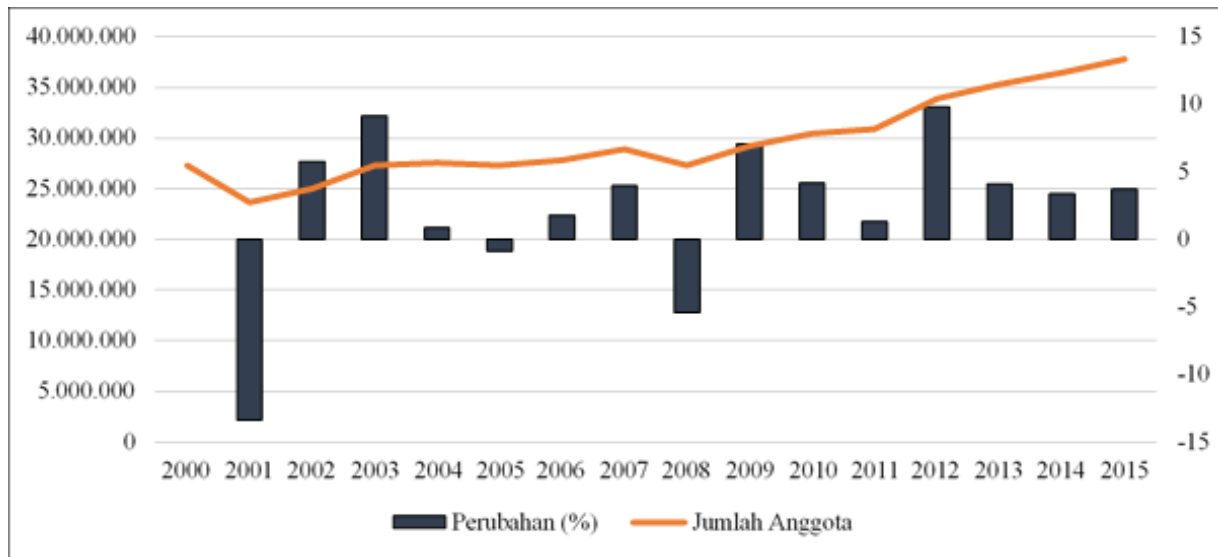
• Perkembangan jumlah anggota

Perbedaan koperasi dengan PT dan CV adalah koperasi merupakan sekumpulan orang bukan modal. Di koperasi, setiap anggota memiliki hak yang sama tanpa memandang berapa banyak kontribusi ekonomi yang telah diberikan atau dikenal sebagai *one man one vote*.

Sejak tahun 2000 hingga tahun 2015, jumlah anggota koperasi tumbuh sekitar 2 persen setiap tahunnya. Pada tahun 2000, terdapat 27.295.893 orang yang terdaftar sebagai anggota. Lima belas tahun berikutnya, telah mencapai 37.783.160.

Apabila dibandingkan antara jumlah anggota dan jumlah koperasi, pada tahun 2000 setiap koperasi memiliki jumlah anggota sekitar 265 orang. Akan tetapi, pada tahun 2015, rata-rata koperasi terdiri dari 178 anggota. Penurunan ini menunjukkan bahwa minat masyarakat bergabung di koperasi semakin rendah. Dengan kata lain, koperasi belum mampu menghadirkan apa yang telah menjadi tujuannya, yakni

meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.



Gambar 4. Perkembangan jumlah anggota koperasi

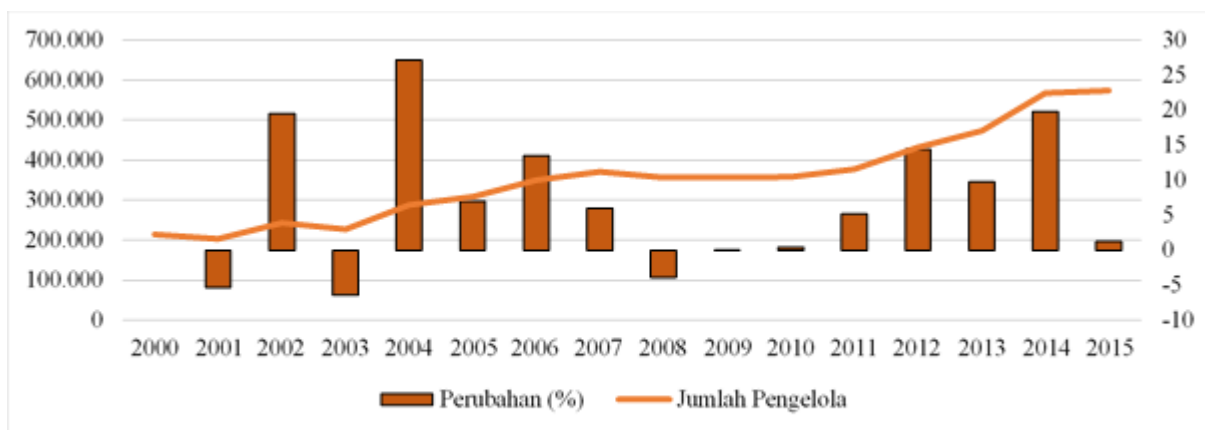
Dapat dilihat pada Gambar 4 mengenai dinamika perkembangan jumlah anggota. Koperasi mengalami pertumbuhan yang semakin menurun. Apabila dilihat di lapangan, koperasi yang umum mengalami hal ini adalah koperasi pertanian dan koperasi unit desa. Kedua koperasi ini didirikan sejak era orde baru dan masih bertahan sampai saat ini. Akan tetapi, karena kaum muda tidak begitu tertarik untuk terjun di sektor pertanian, koperasi ini merasakan dampaknya. Ketika hendak melakukan regenerasi pengurus maupun pengawas, kaum muda cenderung tidak mau.

• **Perkembangan jumlah pengelola**

Pengelola dalam penelitian ini terdiri dari manajer dan karyawan. Jumlah pengelola

menggambarkan sejauh mana kontribusi koperasi dalam penyerapan tenaga kerja. Pada tahun 2000, koperasi mampu memberi pekerjaan kepada 214.359 orang. Peran tersebut berlipat ganda lima belas tahun kemudian, dengan serapan tenaga kerja sebanyak 574.451 orang sebagai manajer dan karyawan.

Secara akumulasi, koperasi mampu menyerap banyak tenaga kerja. Akan tetapi, kalau dibandingkan jumlah manajer dan karyawan dengan jumlah koperasi, maka diketahui pada tahun 2000, satu koperasi rata-rata hanya memiliki 2 pengelola. Hal ini tidak jauh berbeda di tahun 2015, dimana satu koperasi memiliki pengelola sekitar 3 orang.



Gambar 5. Perkembangan jumlah pengelola

gambar 5 memberikan informasi mengenai dinamika jumlah pengelola koperasi di Indonesia. Jumlah pengelola bertambah sebagai akibat semakin banyaknya koperasi yang didirikan. Hal ini berarti koperasi yang ada belum mampu menciptakan pertumbuhan terhadap serapan tenaga kerja.

Penyebab rendahnya serapan tenaga kerja oleh koperasi salah satunya adalah kapasitas usaha yang belum terlalu besar sehingga cukup mengandalkan pengurus..

4. SIMPULAN

Kinerja keuangan koperasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang positif atau semakin membaik. Namun demikian, struktur permodalan koperasi seiring berjalannya waktu semakin didominasi oleh modal luar yang pada umumnya berupa hutang.

Pada aspek non keuangan, koperasi di Indonesia menunjukkan perkembangan yang semakin menurun: Jumlah koperasi tidak aktif semakin bertambah seiring bertambahnya jumlah koperasi, koperasi aktif namun tidak melaksanakan RAT menunjukkan kecenderungan yang meningkat, jumlah anggota semakin berkurang, dan serapan tenaga kerja belum mampu dimaksimalkan karena keterbatasan koperasi baik secara finansial maupun kesiapan organisasi..

5. REFERENSI

- Astawa, I. G. P. B., Julianto, I. P., & Dewi, L. G. K. (2020). Penilaian Kinerja Koperasi Unit Desa (KUD) Penebel Tabanan dengan Pendekatan Balanced Scorecard. *MONEX*, 9(1), 18–29.
- Faedlulloh, D. (2015). Modal Sosial dalam Gerakan Koperasi. *IPJA-the Indonesian Journal of Public Administration*, 2(1).
- Ikhsan, A. E. (2013). Analisis Kinerja Koperasi. *Pekbis Jurnal*, 5(1), 41–50.
- Mahardhika, W. A. (2020). *Menkop akan sisir koperasi nakal dan mati suri*. <https://money.kompas.com/read/2020/02/02/090100026/menkop-akan-sisir-koperasi-nakal-dan-mati-suri>
- Rori, H. (2013). Analisis Penerapan Tax Planning Atas Pajak Penghasilan Badan. *Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Akuntansi*, 1(3), 410–418.
- Sartono, H. A. T. (2010). Revitalisasi Kaidah Koperasi Dalam Sistem Ekonomi Kerakyataan. *MMH*, 39(3), 245–252.

- Siregar, A. P. (2019). Dampak Otonomi Daerah dan Pemekaran Wilayah terhadap Perkembangan Koperasi di Indonesia. *Agridevina*, 8(1), 58–71.
- Siregar, A. P., & Jamhari. (2013). Analisis Kinerja Koperasi Unit Desa di Daerah Istimewa Yogyakarta. *Agro Ekonomi*, 24(2), 113–124.
- Susanti, M. I. (2015). Peran Koperasi Serba Usaha (KSU) “Mitra Maju” Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Anggota Di Kampung Sumber Sari Kabupaten. *Ejournal Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 558–570. [http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/Jurnal_04-09-15-01-54-47\).pdf](http://ejournal.ip.fisip-unmul.ac.id/site/wp-content/uploads/2015/04/Jurnal_04-09-15-01-54-47).pdf)
- Tolong, A., As, H., & Rahayu, S. (2020). Analisis Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam pada Koperasi Suka Damai. *JAMBURA ECONOMIC EDUCATION JOURNAL*, 2(1), 25–33.
- Widyani, A. agung dwi. (2015). Knowledge Management dalam Perpspektif Tri Kaya Parisuda serta Pengaruhnya terhadap Kinerja Pengurus Koperasi. *Juima*, 5(2), 1–16. <https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004>
- Zulhartati, S. (2010). Peranan Koperasi dalam Perekonomian Indonesia. *Guru Mmembangun*, 25(3)